

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP ATURAN BIAYA KEMACETAN
PEMERINTAH INGGRIS YANG DIBEBAHKAN KEPADA
DIPLOMAT ASING DI KOTA LONDON BERDASARKAN
KONVENSI WINA 1961**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD AFDAL

2110117026

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Magdariza, S.H., M.H

Zimtya Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ANALISIS TERHADAP ATURAN BIAYA KEMACETAN PEMERINTAH INGGRIS YANG DIBEBAHKAN KEPADA DIPLOMAT ASING DI KOTA LONDON BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

(Muhammad Afdal, 2110117026, 85 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara satu negara dengan negara lainnya. Penyelenggaraan hubungan tersebut diwujudkan dengan cara menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim kepada negara penerima, serta diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan tugas atau misinya dengan baik. Ketentuan bebas pajak merupakan salah satu bentuk keistimewaan terhadap diplomat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Penerapan ketentuan bebas pajak ini merupakan hal yang sensitif dalam hubungan diplomatik antar negara, salah satunya seperti yang terjadi di London, Inggris, yang menerapkan *Congestion Charge* (Biaya Kemacetan) kepada seluruh pengendara yang melintasi zona tersebut, termasuk para diplomat. Menurut para diplomat, biaya kemacetan dianggap sebagai pajak berdasarkan Pasal 34 Konvensi Wina 1961, yang menetapkan bahwa agen diplomatik dibebaskan dari pembayaran. Sedangkan Pemerintah Inggris menjelaskan bahwa biaya kemacetan adalah biaya retribusi karena merupakan biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu yang diberikan, yang merupakan salah satu pengecualian terhadap ketentuan umum pembebasan pajak berdasarkan Pasal 34 (e) Konvensi Wina 1961. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis terhadap kebijakan Pemerintah Inggris mengenai biaya kemacetan yang diterapkan kepada diplomat asing menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana pengaturan Biaya kemacetan di Amerika Serikat, Swedia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach sebagai pendekatan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan juga web sourcing. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa biaya kemacetan tidak dapat disebut sebagai retribusi berdasarkan pasal 34 Konvensi Wina 1961 karena biaya tersebut tidak memberikan layanan langsung kepada para diplomat yang melintasi zona tersebut. Penerapan biaya kemacetan di Amerika Serikat, Swedia dan Singapura berbeda dengan yang diterapkan di kota London Inggris. seperti di New York, Amerika Serikat menyatakan pembebasan biaya kemacetan yang ditetapkan oleh Otoritas Transportasi Metropolitan New York terhadap misi asing dan organisasi internasional tertentu. Sedangkan di Swedia, Biaya Kemacetan bukanlah biaya layanan, melainkan pajak nasional dari sudut pandang hukum. Di Singapura, Biaya Kemacetan atau disebut ERP dikecualikan dari kendaraan darurat serta kendaraan diplomatik.

Kata kunci : Biaya Kemacetan, Pemerintah Inggris, Diplomat, Kota London, Konvensi Wina 1961

**AN ANALYSIS OF THE UK GOVERNMENT'S CONGESTION CHARGE
RULES IMPOSED ON FOREIGN DIPLOMATS IN THE CITY OF LONDON
UNDER THE 1961 VIENNA CONVENTION**

(Muhammad Afdal, 2110117026, 85 Pages, Faculty Of Law Andalas University,
2025)

ABSTRACT

Diplomatic relations are relations that are carried out between one country and another. The implementation of the relationship is realized by placing diplomatic representatives of the sending country to the receiving country, and given the right of immunity and privileges to be able to carry out their duties or missions properly. The tax-free provision is one form of diplomats, as stipulated in Article 34 of the 1961 Vienna Convention. The application of this tax-free provision is a sensitive matter in diplomatic relations between countries, one of which is the case in London, England, which applies a Congestion Charge to all motorists crossing the zone, including diplomats. According to diplomats, the congestion charge is considered a tax under Article 34 of the 1961 Vienna Convention, which stipulates that diplomatic agents are exempt from payment. Meanwhile, the UK Government explains that the congestion charge is a levy as it is a fee charged for a specific service provided, which is one of the exceptions to the general provision of tax exemption under Article 34(e) of the 1961 Vienna Convention. The formulation of the problem in this research discusses how to analyze the British Government's policy regarding congestion charge applied to foreign diplomats according to the 1961 Vienna Convention and how the regulation of Congestion Charge in the United States, Sweden and Singapore. The method used is normative by using statute approach and conceptual approach as the research approach. Data is collected through literature study and also web sourcing. The data that has been collected is analyzed qualitatively by using interpretative method. The result in this study is that congestion charge cannot be called as retribution under article 34 of the 1961 Vienna Convention because the charge does not provide direct service to the diplomats crossing the zone. The application of congestion charge in the United States, Sweden and Singapore is different from the one applied in the city of London, England. as in New York, the United States states waives the congestion charge set by the New York Metropolitan Transportation Authority for foreign missions and certain international organizations. Whereas in Sweden, the Congestion Charge is not a service charge, but a national tax from a legal point of view. In Singapore, Congestion Charge or called ERP is exempted from emergency vehicles as well as diplomatic vehicles.

Keywords: *Congestion Charge, UK Government, Diplomats, London City, Vienna Convention 1961*